DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Julastiana, Yaneka. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*. Bali.
- Kusumah, B. 2001. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: PT Gramedia.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2003. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Nazir, M. 2004. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ngazizah, Siti. 2012. "Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung)". *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya (STIESIA). Surabaya.
- Priantara, Diaz. 2012. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Resmi, Siti. 2008. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Mariot P. 2005. *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Jakarta*: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. 2001. Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Jakarta: Eresco.
- Soeratno dan Arsyad, Lincolin. 2003. *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*. Edisi Revisi. Yogyakarta: IPP AMP YKPN.
- Suandy, E. 2005. *Hukum Pajak*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Suartana, I Wayan. Perbandingan Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Dinas Pendapatan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Bali.

- Sugiono. 2012. Sistem Pemungutan Pajak Daerah di Tulungagung Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, Juni 2012.
- Suryabrata, Sumadi. 2005. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tjahyono, A dan Muhammad F. Husain. 2009. *Perpajakan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.